



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah



PKAKN

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

**Tim Penulis Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**



Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah
i-xiii, 1-74 hlm: 15 x 23 cm
ISBN 978-602-50017-0-3

Hak Cipta @ 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab/Ketua

Helmizar

Koordinator

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.

Editor

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Anggota Tim

Ageng Wardoyo, S.H.

M. Aaqil Imama, S.I. Kom.

Sarjiyanto, S.E., MBA.

Eko Adityo Ananto, S.E., MBA.

Pandu Narendradewo, S.Mn, M.A.

Febri Kuntarto, S.E., MBA.

Medhia Hartanti, S.E., M.Ak.

Nur Muhamad Ridwan, S.E.

Sindi Meida Rizkiana, S.E.

Mochammad Rizal Firmansyah, S.E.

Vita Puji Lestari, S.E.

Syandi Negara, S.Sos.

Sekar Aditya Dwikirana, S.E.

Desain Sampul dan Layout

Eri Fareza, S.I. Kom.

Diterbitkan :

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto

Lantai 6 Ruang 605, Jakarta 10270

Tlp. 021 – 5715 735 / 733



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku yang berjudul “**Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah**” dapat diselesaikan.

Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *Good & Clean Governance*.

BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari hasil studi lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akruaI untuk TA 2016.

Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPD di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan Maluku yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait.

Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi *public stakeholders* atas opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah.

BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan buku yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami, buku ini memberikan manfaat bagi pembaca dan *public stakeholders* di semua level pemerintahan di Indonesia. **Selamat membaca.**

Jakarta, Agustus 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA

HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003



PROLOG

Akuntabilitas secara umum dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan administrasi publik. Oleh karena itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintahan suatu negara dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam rangka terwujudnya *Good & Clean Governance*.

Khusus dilihat dari aspek keuangan, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka, Pemerintah Indonesia perlu secara terus menerus melakukan upaya reformasi pengelolaan keuangan negara menuju ke arah yang lebih baik.

Upaya reformasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah perubahan kebijakan akuntansi dari Standar Akuntansi berbasis kas (*cash basis*), menjadi kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dan akhirnya menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Sehingga penerapan SAP berbasis akrual diharapkan dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan sebagaimana ditegaskan dalam *Study 14 IFAC Public Sector Committee* (2002).

Namun, hasil studi lapangan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat BPK atas kesiapan pemerintah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan yang terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 BPK mengungkapkan bahwa dari 533 LKPD TA 2015, sebanyak 31 (6%) LKPD memperoleh opini TMP dimana 51% atau 16 LKPD yang memperoleh opini TMP tersebut berada di Indonesia bagian timur (Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat). Bahkan 14 dari 16 LKPD memperoleh opini TMP selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Pemaparan lebih lengkap mengenai permasalahan dan kendala kualitas opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Wilayah Indonesia Timur diuraikan sebagai salah satu tema dalam buku ini.

Berdasarkan realita di atas, langkah perbaikan secara terus-menerus perlu diupayakan oleh pemerintah agar tujuan dan sasaran dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memberikan kontribusi bagi implementasi otonomi daerah terutama dalam membangun kemandirian dan percepatan pembangunan daerah. Pada akhirnya, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan seluruh *stakeholder* dimana hasilnya mengarah pada tingginya tingkat kepercayaan yang berpengaruh terhadap iklim investasi dalam menarik minat investor dan stabilitas laju pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga reformasi di bidang keuangan dapat memaksa pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan sehingga lebih terukur dan terstruktur dalam mengidentifikasi kapasitas pemerintah daerah tersebut untuk mendanai kegiatannya. Salah satu yang dibahas pada buku ini adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Hibah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Dengan demikian, dinamika permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disusun menjadi satu kesatuan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi pembaca secara umum. Khususnya bagi *public stakeholder* dapat dijadikan basis awal dalam perumusan kebijakan menuju perbaikan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.

Tim Penyusun



BAB I

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang memaksa pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi Pemerintah Indonesia telah berubah arah dari basis kas menuju basis akrual dan standar akuntansi tersebut secara penuh wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah se-Indonesia paling lambat pada Tahun Anggaran 2015. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan LKPD. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam penerapan SAP berbasis akrual ini, Pemerintah Daerah masih mengalami kendala terutama terkait dengan 3 (tiga) area kunci ruang lingkup pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

Kata kunci : standar akuntansi pemerintah, basis akrual, LKPD



BAB II

**OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT (TMP)
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI PAPUA DAN MALUKU:
PERMASALAHAN DAN KENDALA**

ABSTRAK

Penilaian atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD diwujudkan dalam opini BPK sebagai representasi atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 mengungkapkan bahwa dari 533 LKPD TA 2015, 31 (6%) LKPD memperoleh opini TMP dimana 51% atau 16 LKPD yang memperoleh opini TMP tersebut berada di Indonesia bagian timur (Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat). Bahkan 14 dari 16 LKPD memperoleh opini TMP selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Persoalannya adalah, apakah yang menjadi permasalahan dan kendala pada 14 LKPD di Papua dan Maluku memperoleh opini TMP selama lima tahun berturut-turut? Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memaparkan permasalahan yang muncul dan kendala yang dihadapi atas perolehan opini TMP tersebut. Hasil kajian menunjukkan berulangnya permasalahan utama terkait dengan pengelolaan Aset Tetap, pencatatan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran/Kas Daerah, Persediaan dan Aset Lainnya, pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa/Modal, dan penatausahaan Piutang Pajak. Permasalahan yang timbul disebabkan beberapa kendala yang dihadapi baik bersifat teknis (kebijakan akuntansi, prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi) maupun non teknis (geografis, manajemen kepemimpinan, ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah, dan hambatan Teknologi Informasi).

Kata kunci: Opini TMP, Indonesia Timur, LKPD



BAB III

IDENTIFIKASI PERAN OPINI BPK SEBAGAI REFERENSI INVESTASI DI DAERAH: STUDI KASUS KAB BANYUWANGI, KOTA SEMARANG & KOTA PARIAMAN

ABSTRAK

Indikator tingkat kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan tersebut. Kualitas opini BPK atas LKPD merupakan refleksi tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Tinggi rendahnya tingkat akuntabilitas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah. Persoalannya adalah, bagaimana perkembangan kualitas opini BPK atas LKPD dan perkembangan nilai investasi di daerah se-Indonesia? Apakah perkembangan kualitas opini BPK tersebut dapat mempengaruhi perkembangan nilai investasi daerah? Kajian ini bertujuan untuk menjawab kedua persoalan tersebut. Untuk mengkaji pengaruh tersebut, kajian ini melakukan analisis isi atas laporan dan opini BPK serta melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruhnya terhadap investasi di daerah. Hasil analisis menggambarkan bahwa peningkatan kualitas opini BPK sebagai refleksi LKPD yang sehat belum berpengaruh terhadap perkembangan iklim investasi di daerah dan belum menjadi pertimbangan investor dalam menentukan keputusan investasinya, meskipun di daerah terdapat kondisi peningkatan atau penurunan yang berbanding lurus antara kualitas opini BPK atas LKPD dengan nilai investasi dalam suatu daerah.

Kata kunci: Opini BPK, Investasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB IV

AKUNTABILITAS ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, KPU sebagai penyelenggara mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD dan dapat didukung melalui APBN. Pertanggungjawaban pengelolaan dana penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya belanja yang bersumber dari hibah masih menyisakan permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya dari sisi anggaran dan faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas dana hibah KPU. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis isi yang kemudian di konfirmasi melalui wawancara langsung dengan *public stakeholders* untuk mendapatkan data perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan dana hibah oleh KPU masih belum optimal, hal ini ditandai dengan munculnya beberapa catatan dari BPK terkait hibah dan terdapat tujuh faktor penghambat akuntabilitas dana hibah KPU.

Kata kunci: Dana Hibah, Pilkada Serentak dan Akuntabilitas Anggaran